STUDI PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN PASCA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN (BOP) (STUDI KASUS KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT)

Zahron Helmy

(Penyuluh Pertanian pada Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian Jakarta)

ABSTRACT

Agriculture development cannot go well except that supported by existence of systems of agriculture extension. Agriculture extension represent the effort to develop ability, knowledge, skill and farmer attitude with their family and other stake holder passing study process so that will be and able to help and also him self organization, owning to access information source, technological and other resources to work along mutual profitable in solving problem faced, so that they can improve the productivity, efficiency business, earnings and prosperity. On that account revitalization of agriculture extension which one of them by passing needed absolute financial aspect. The fact of financial support from government to local government by passing Public Allocation Fund (DAU) And Special Allocation Fund (DAK) and also operating cost agriculture extension given in order to supporting the make-up of performance extension agent of agriculture and resources of implementation, to transferred for the other activity which not directly related the agricultural activity. Utilize to overcome the problems, government hence since budget year 2005 / 2006, making a change strategy of extension budgeting, specially budgeting for extension agent of agriculture in order to make-up of performance by giving direct operating cost agriculture extension (BOP) by personal account. The result of study shown that implementation of agriculture extension after giving BOP, in amount tend to increase, shown from relative height of percentage of exploiting BOP for the activity of preparation (84,55%) and implementation (87,27%). While effectiveness of implementation based on preparation activity before and after giving of BOP, increase relative by significant, specially to compilation program and plan the job of extension agent agriculture, but from quality side tend to downhill, shown from applying of preparation activity which relative lower to cover the applying program (21, 78%), RKPP (29,52%) and items (46,36%),

Key Words : development, extension agriculture, operating cost for extension agriculture

PENDAHULUAN

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) merupakan strategi umum untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan petani hutan, meningkatkan daya saing produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta menjaga kelestarian sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan. Strategi umum ini juga menjadi bagian utama dari agenda nasional pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan daya saing, membangun ketahanan pangan, membangun perdesaan, membangun daerah dan mengurangi ketimpangan antar wilayah dan melestarikan mutu lingkungan hidup. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan penyuluhan pertanian yang mampu membantu petani dan pelaku usaha pertanian lainnya untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupan serta meningkatkan kesejahteraannya, yang merupakan hak azasi setiap warga negara Republik Indonesia (Badan Pengembangan SDM Pertanian, 2005).

Pembangunan pertanian tidak bisa berjalan lancar kalau tidak didukung oleh adanya sistim penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap petani beserta keluarganya dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui proses pembelajaran agar mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya, memiliki akses ke sumber informasi, teknologi dan sumberdaya lainnya untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya. Peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi

memerlukan sistim penyuluhan pertanian dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang sesuai dengan arah pengembangan penyuluhan pertanian dan kondisi penyuluhan pertanian saat ini.

Sistim penyuluhan pertanian adalah suatu sistim pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap petani beserta keluarganya dan pelaku usaha pertanian lain melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Sistim penyuluhan pertanian meliputi komponen kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang mantap dan mendapatkan kepastian sehingga pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya dapat dilaksanakan secara baik, teratur dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, petani dan/atau warga masyarakat lainnya, didasarkan pada suatu programa penyuluhan yang disusun secara bersama antara penyuluh pertanian dan petani, melalui hubungan fungsional yang bersifat terbuka, saling ketergantungan dan demokratis. Sehingga pada akhirnya pembiayaan penyuluhan pertanian merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, petani maupun swasta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan.

Salah satu tugas Penyuluh Pertanian sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang adalah berupaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan, kemandirian serta tanggung jawab dari petani beserta keluarganya dalam memanfaatkan dan meningkatkan mutu sumberdaya pertanian di dalam usahataninya. Kegiatan penyuluhan pertanian sebagai proses belajar para petani melalui pendekatan kelompok dan diarahkan untuk terwujudnya kemampuan kerjasama yang lebih efektif sehingga mampu menerapkan inovasi, mengatasi berbagai resiko usaha, dan menerapkan azas skala usaha yang ekonomis.

Pengembangan kemampuan petani yang berlangsung melalui proses belajar tersebut, terwujud berkat adanya interaksi sistematis dan berkelanjutan antara petani dengan Penyuluh Pertanian guna mempelajari berbagai subyek yang mencakup aspek-aspek teknis, sosial dan ekonomi dari berusahatani. Dengan demikian peranan Penyuluh Pertanian dalam proses belajar tersebut sangat penting. Sehubungan dengan itu, maka para Penyuluh Pertanian perlu selalu melakukan upaya untuk melengkapi dirinya dengan informasi dan inovasi mutakhir, serta terus meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan metodik penyuluhan, di samping menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan penyuluhan pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Pada kenyataannya dukungan pembiayaan dari pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan petani melalui penyelenggaraan penyuluhan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Dukungan pembiayaan yang relatif kecil dari pemerintah terhadap pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta biaya operasional penyuluhan pertanian yang utamanya diberikan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja penyuluh pertanian dan sumberdaya pelaksanaan penyuluhan, dialihkan untuk kegiatan-kegiatan lain yang secara langsung tidak berhubungan dengan kegiatan pertanian. Selain itu kontribusi pembiayaan dari petani/kelompoktani maupun pengusaha swasta di bidang pertanian relatif sangat kecil. Hal ini menyebabkan kebijakan revitalisasi penyuluhan pertanian, khususnya peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh pertanian, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peningkatan kepemimpinan dan kelembagaan petani, pengembangan kerjasama dan jejaring kerja penyuluhan pertanian dan agribisnis berjalan relatif lambat dan cenderung statis (Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, 2005).

Oleh sebab itu, guna mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah sejak tahun anggaran 2005/2006, melakukan perubahan strategi penganggaran penyuluhan, khususnya penganggaran bagi penyuluh pertanian dalam rangka peningkatan kinerja dengan memberikan langsung Biaya Operasional Penyuluh (BOP) melalui rekening pribadi. BOP yang diberikan pemerintah kepada penyuluh pertanian, sebagaimana tertuang dalam

pasal 33 penjelasan Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, merupakan standart minimal, yang diperuntukkan bagi perjalanan tetap, biaya perlengkapan, percontohan, penyusunan materi, dan penyusunan rencana kerja. Adapun maksud dari pemberian BOP tersebut adalah sebagai alat ukur bagi pelaksanaan 9 (sembilan) indikator kinerja penyuluh pertanian yaitu;

1. penyusunan program penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani (BPP, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional),
2. penyusunan rencana kerja penyuluh pertanian di wilayah kerja masing-masing.
3. penyediaan data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pewilayahan komoditas unggulan,
4. desiminasi informasi teknologi pertanian secara merata dan sesuai dengan kebutuhan petani.
5. menumbuhkembangkan keberdayaan dan kemandirian petani, kelompoktani, kelompok usaha/asosiasi petani dan usaha formal (koperasi dan lembaga formal lainnya),
6. mewujudkan kemitraan usaha antara petani dengan pengusaha yang saling menguntungkan,
7. mewujudkan akses petani ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi pertanian dan pemasaran.
8. meingkatkan produktivitas agribisnis komoditas unggulan di masing-masing wilayah kerja,
9. meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani di masing-masing wilayah kerja.

TUJUAN

Tujuan studi pelaksanaan penyuluhan pertanian pasca pemberian Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan pemberian BOP terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian berdasarkan kondisi responden,
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan berdasarkan kegiatan persiapan penyuluhan,
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan berdasarkan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif (Natsir, 1999) terhadap semua variabel yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota. Informasi dari pemerintah kabupaten/kota berupa data primer dan data sekunder, sedangkan dari pemerintah provinsi dan pusat dibatasi dengan data sekunder berupa pedoman umum, norma-norma, standar dan sejenisnya. Variabel studi ditelaah dari 2 (dua) aspek utama dalam pemanfaatan BOP, yaitu aspek persiapan penyuluhan meliputi kegiatan penyusunan programa, penyusunan rencana kerja penyuluh pertanian, penyusunan materi penyuluhan dan aspek pelaksanaan penyuluhan meliputi kegiatan kunjungan, bimbingan dan pembuatan demonstrasi percontohan, serta aspek lain yang mendukung, yaitu identitas responden (meliputi tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, tahun masuk kerja, lama bekerja, jam kerja, jarak tempuh) dan pemanfaatan fasilitas penyuluhan (kepemilikan kendaraan, ketersediaan buku informasi pertanian).

Penentuan lokasi sampel dilakukan secara *purposive*, dengan urutan kabupaten yang memiliki kantor penyuluhan, mendapatkan BOP dan fasilitas berupa kendaraan bermotor (roda 2). Responden adalah seluruh penyuluh pertanian di Kabupaten Sukabumi penerima BOP baik tingkat pendidikan SPP/SPMA, D-III, D-IV/S-1 maupun S-2 dengan jumlah sebanyak 110 orang responden.

Metode diskriptif tidak melakukan pengujian terhadap variabel, maka kekuatan analisis sangat ditentukan oleh kebenaran jawaban yang diberikan responden melalui kuesioner hasil pencacahan dan hasil studi mendalam *(indepth study)* yang merupakan kutipan pernyataan dari responden yang mengungkapkan hal-hal yang berkaiatan dengan pelaksanaan penyuluhan di wilayahnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Kondisi responden yang menjadi bagian analisis adalah; jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, tahun masuk kerja, lama sebagai penyuluh. Jumlah responden penyuluh pertanian sebanyak 110 orang yang terdiri dari 93 orang (84, 55%), berjenis kelamin pria dan 17 orang (15,45 %) berjenis kelamin wanita, dengan tingkat pendidikan sebanyak 77 orang (70%) berpendidikan D-III, 26 orang (23,64%) dan 7 orang(6,36%) berpendidikan setingkat S-1 dan SLTA. Secara rinci tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan							
		SLTA		D-3		D-4/S-1		Total	
		jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
1	Laki-laki	6	85,71	64	83,12	23	88,46	93	84,55
2	Perempuan	1	14,29	13	16,88	3	11,54	17	15,45
	Jumlah	7	100,00	77	100,00	26	100,00	110	100,00

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2007.

Berdasarkan tahun masuk kerja sebagai penyuluh pertanian, maka tahun masuk kerja tertua adalah tahun 1970 dengan masa kerja tertinggi 37 tahun dan tahun masuk kerja termuda tahun 2003 dengan masa kerja 3 tahun. Rata-rata tahun masuk kerja responden sebagai penyuluh pertanian adalah tahun 1981 dengan rata-rata masa kerja 24,71 tahun dan rata-rata usia 48,92 tahun.

Jika dilihat dari usia rata-rata responden di atas usia produktif. Ini menunjukkan bahwa secara teori pemberian input baik yang bersifat *fisically* maupun material tidak akan sebanding secara relatif dengan output yang diberikan secara kuantitas maupun kualitas, walaupun dari sisi pengalaman penyuluhan responden yang relatif lama dan didukung dengan jarak lokasi wilayah binaan relatif dekat yaitu rata-rata terjauh 21,10 km2 (31,48% responden) dan rata-rata terdekat 5,89 km2 (63,89% responden), hanya membutuhkan waktu tempuh rata-rata 44,36 menit, dengan menggunakan kendaraan dinas (motor).

Tabel 2. Rata-rata umur, tahun masuk kerja dan pengalaman Penyuluhan pertanian

No	Jenis Kelamin	Rata-rata Usia, Tahun masuk dan Pengalaman		
		Usia (thn)	TMT masuk (thn)	Pengalaman PP (thn)
	Laki-laki	49.50	1980	25.28
	Perempuan	45.77	1984	21.71
	Rata2 Total	48.92	1981	24.71

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2007.

Pemanfaatan Biaya Operasional Penyuluh (BOP)

Biaya operasional penyuluhan (BOP) sebagaimana yang dimaksud adalah biaya yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh penyuluh pertanian PNS, dan diberikan melalui rekening pribadi, yang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh setiap penyuluh kepada petani dan atau kelompoktani di wilayah

kerjanya. Hasil studi menunjukkan bahwa sebelum adanya BOP dari pemerintah pusat sebesar Rp. 250. 000,-/orang/bulan, pemerintah daerah juga telah memberikan biaya tambahan operasional penyuluhan secara rutin kepada setiap penyuluh pertanian sebesar Rp.120.000/orang/bulan,-. BOP yang diberikan pemerintah pusat melalui rekening pribadi, secara riil diterima sebesar Rp. 212.500,-/org/bulan dan dicairkan per tiga bulan sekali. Sedangkan biaya operasional tambahan yang diberikan oleh pemerintah daerah diterima riil setiap bulan sebesar Rp. 114.927,-/org/bulan.

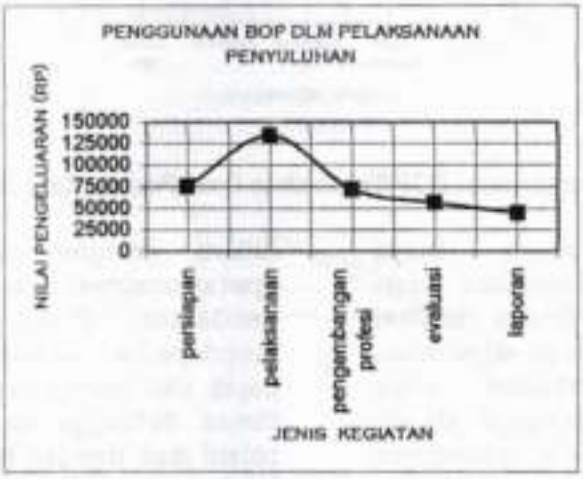

Gambar 1. Penggunaan BOP Dalam Pelaksanaan Penyuluhan

Proses pencairan BOP, 88 orang responden (80%) menyatakan lancar dikarenakan dicairkan melalui bank cabang dan 22 orang responden (20%) menyatakan kurang lancar, dikarenakan pencairan dilakukan melalui bank unit yang tidak *on line*. Pemanfaatan BOP oleh penyuluh pertanian sebanyak 84,55% dan 87,27% responden menggunakan untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaan penyuluhan. Kegiatan persiapan tersebut meliputi; penyusunan rencana kerja penyuluh pertanian (RKPP), penyiapan bahan dan materi penyuluhan yang akan digunakan dalam rangka kunjungan dan pelatihan petani. Sedangkan kegiatan pelaksanaan penyuluhan meliputi kegiatan kunjungan, bimbingan dan demonstrasi percontohan.

Adapun besarnya biaya yang dikeluarkan dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan penyuluhan, rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 75.383,12,-/org/bln dan Rp. 134.267,05,-/org/bln (gambar 1). Tingginya pengeluaran biaya dalam rangka kegiatan persiapan maupun pelaksanaan tersebut, menunjukkan kesadaran penyuluh pertanian Kabupaten Sukabumi akan pentingnya sebuah perencanaan (programa), yang merupakan acuan disusunnya jadual kegiatan penyuluhan (RKPP), dan yang selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan penyuluhan berupa kunjungan, bimbingan maupun demonstrasi percontohan melalui dukungan ketepatan materi dan media yang sesuai dengan kondisi sumberdaya alam dan kebutuhan petani dan atau kelompoktani. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli perencanaan bahwa 50% keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan ditentukan oleh perencanaan yang tertulis, dengan memperhatikan kondisi teknis, ekonomis dan sosial budaya setempat.

Gambar 2. Penggunaan BOP Tambahan Dari Pemda Kab. Sukabumi

Sedangkan pemanfaatan biaya tambahan operasional penyuluhan dari pemerintah daerah sebagaimana terlihat pada gambar 2, pada umumnya digunakan oleh para penyuluh pertanian untuk memenuhi kebutuhan transportasi dalam rangka rapat-rapat dinas ke kabupaten ataupun kecamatan/desa, dan tambahan biaya penyusunan materi (atk) maupun untuk tambahan dalam rangka latihan di BPP. Relatif tingginya penggunanan biaya tambahan opersional dalam bentuk kunjungan ke petani dan atau kelompoktani (Rp. 90.481,92/org/bln) atau 78,73%, menunjukkan bahwa selain pemanfaatan dana yang sesuai dengan kebijakan PEMDA Kab. Sukabumi, diperuntukkan dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluhan, juga menunjukkan bahwa kegiatan kunjungan merupakan tugas utama penyuluh pertanian dalam rangka pembinaan usahatani petani dan atau kelompoktani.

Jika dilihat dari nilai BOP yang diberikan oleh pemerintah pusat dan tambahan biaya operasional dari PEMDA, secara total sebenarnya penyuluh pertanian memperoleh Rp. 327.427,- org/bln. Tetapi sebanyak 77% responden menyatakan BOP yang diberikan dan tambahan operasional PEMDA, masih dirasakan kurang. Bahkan 33% menyatakan sangat kurang. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya kegiatan yang harus dibiayai oleh BOP, mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Dan juga mengingat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sekarang ini tidak diikuti dengan dukungan pembiayaan operasionalnya. Sebagai contoh, pemberian kendaraan dinas (motor), tidak lagi mendapatkan dukungan biaya perawatan, pajak dan bensin, sebagaimana dahulu era Bimas. Sehingga untuk lokasi binaan yang relatif jauh dengan kondisi jalan yang relatif jelek memerlukan biaya perawatan kendaraan dan lainnya.

Besaran ideal (kelayakan) rata-rata BOP yang diharapkan oleh penyuluh di Kabupaten. Sukabumi agar semua bentuk kegiatan penyuluhan mulai dari persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi dan pelaporan dapat dijalankan dengan optimal adalah sebesar Rp. 545.111,-/orang/bln.

Persiapan Penyuluhan Pertanian

Pelaksanaan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian dalam studi ini dititik beratkan kepada pemanfaatan BOP untuk kegiatan penyusunan programa, RKP dan penyusunan materi penyuluhan. Berdasarkan hasil studi, walaupun relatif kecil namun ada peningkatan secara signifikan dalam kegiatan persiapan penyuluhan dari sebelum dan setelah diberikannya BOP. Hal ini terutama ditunjukkan dari kegiatan penyusunan programa penyuluhan dan RKPP. Sebelum diberikan BOP tingkat partisipasi penyuluh dalam penyusunan programa dan RKPP hanya 76,36% dan 91,82%, dan setelah mendapatkan BOP tingkat partisipasi dalam penyusunan programa dan RKPP meningkat menjadi 92,66% dan 95,45%.

Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian.

Programa penyuluhan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena merupakan dasar perencanaan bagi setiap kelembagaan penyuluhan pertanian dalam menyelenggarakan penyuluhan di wilayah kerjanya mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. Adapun ruanglingkup matrik kegiatan di dalam programa meliputi keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Programa penyuluhan yang disusun satu tahun sekali, pada hakekatnya disusun oleh para penyuluh pertanian bersama-sama petani guna perpaduan antara kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan pertanian dengan aspirasi petani dan masyarakat pertanian dalam satu kesatuan wilayah pemerintahan. Dan selanjutnya programa merupakan acuan dari setiap penyuluh dalam menyusun RKPP di wilayah kerjanya.

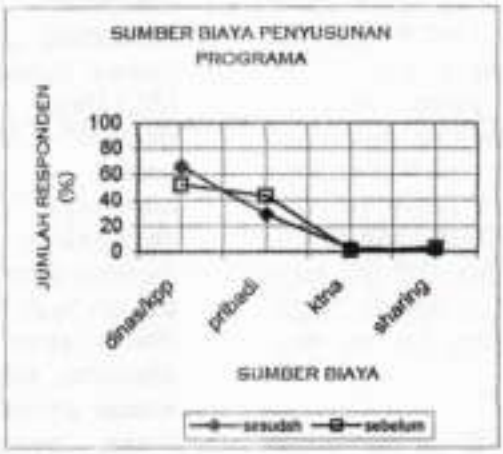

Gambar 3. Sumber Biaya Penyusunan Programa

Keterlibatan penyuluh menjadi penting dalam penyusunan programa, mengingat penyuluh diharapkan mampu merumuskan dan menjembatani aspirasi petani di dalam berusahatani. Hasil studi menunjukkan bahwa terjadi pergeseran persentase sumber pembiayaan penyusunan programa setelah diberikannya BOP. Sebagaimana terlihat pada gambar3, bahwa setelah diberikannya BOP maka sumber pembiayaan penyusunan programa yang berasal dari dana pribadi menurun dari 43,62% menjadi 29,09%. Hal ini wajar mengingat BOP yang diberikan memang tidak diperuntukkan bagi penyusunan programa. Tetapi sumber pembiayaan dari KTNA (wakil kelompoktani) justru meningkat walaupun masih relatif kecil yaitu dari 1.06% menjadi 2.73%. Kondisi ini menggembirakan mengingat arah pengembangan kelompoktani ke depan adalah menjadi **Gabungan Kelompoktani (GAPOKTAN) Mandiri** yang mempunyai unit-unit usaha jasa saprotan, jasa pengolahan, jasa pemasaran dan jasa permodalan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinanan Kelembagaan Petani. Namun demikian peranan swasta *(sharing)* dalam mendorong penyusunan programa sebagai dasar perencanaan penyuluhan cenderung relatif menurun yaitu 3.19% menjadi 1.82%. Penuruan tingkat patisipasi pihak swasta (perusahaan-perusahaan bidang pertanian) dalam pembiayaan penyusunan programa, perlu disikapi secara serius, mengingat perannya sangat dibutuhkan guna mendorong percepatan dan peningkatan produksi pertanian, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Penyusunan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP).

Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP), merupakan jadual kegiatan bagi setiap penyuluh pertanian dalam melaksanakan penyuluhan kepada petani dan kelompoktani di wilayah binaannya. Kegiatan di dalam jadual kegiatan

penyuluhan tersebut meliputi masalah, tujuan, materi, metoda, media/alat bantu, waktu, tempat, sasaran. Hasil studi menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah diberikannya BOP, partisipasi penyuluh dalam penyusunan rencana kerja penyuluh relatif meningkat dari 91,82%. menjadi 95,45%. Tetapi jika dilihat dari sumber biaya penyusunan RKPP, hanya sebanyak 50,75% responden yang menyatakan bahwa biaya penyusunan RKPP seluruhnya bersumber dari BOP. Sedangkan sebanyak 9,70% dan 38,08% responden menyatakan bahwa sumber biaya penyusunan berasal dari dinas dan juga dana pribadi. Besarnya persentase penyuluh yang menyusun RKPP dengan biaya pribadi, menunjukkan bahwa masih tingginya tanggungjawab moral seorang penyuluh terhadap keberhasilan usahatani petani. Hasil pertanyaan mendalam diketahui bahwa tingginya persentase biaya pribadi dalam penyusunan RKPP dikarenakan selain BOP yang diberikan tidak mencukupi, juga responden berdomisili di luar wilayah kerja, sehingga membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar.

Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian

Materi penyuluhan pertanian merupakan bahan informasi penyuluhan baik yang bermuatan teknis, ekonomis manajemen usahatani maupun manajemen organisasi, yang sangat diperlukan petani dan kelompoktaninya dalam melancarkan kegiatan usahatani. Mengingat ini merupakan bahan yang dapat dipedomani oleh petani ataupun kelompoktani, maka materi harus disusun sedemikian rupa agar mudah dimengerti sehingga pada akhirnya petani dan atau kelompoktani tau, mau, dan mampu menerapkannya baik dalam manajemen usahatani maupun lingkungan manajemen organisasi petani. Pengemasan materi dapat dalam bentuk media cetak berupa *leaflet*, brosur, *flipchart*, poster dan lainnya, atau dikemas dalam bentuk lain (media elektronik) seperti siaran radio ataupun saung tani dalam kaset/radio, CD, VCD-DVD.

Hasil studi menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata tingkat partispasi penyuluh dalam penyusunan materi baik sebelum maupun sesudah diberikannya BOP, yaitu sebesar 99,09%, dengan sumber pembiayaan penyusunan materi, 61,24% responden menyatakan bersumber dari BOP, dan 34,11% bersumber dari pribadi penyuluh serta 4,65% bersumber dari dinas/KPP.

Hasil pertanyaan mendalam diketahui bahwa materi yang disusun tersebut sebagian besar merupakan hasil reproduksi dari materi-materi tahun sebelumnya, khususnya untuk materi berlatar belakang teknis (budidaya dan agribisnis). Tingginya tingkat partisipasi responden dalam menyusun jenis materi teknis (98,99%) dibandingkan dengan penyusunan jenis materi manajemen (24,55%) dan ekonomi (32,73%), sebagaimana terlihat pada gambar 4, menunjukkan bahwa usahatani petani di kabupaten Sukabumi pada umumnya masih didominasi kepada pendekatan produksi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa selain responden kekurangan bahan dan informasi materi juga dikarenakan pada umumnya petani masih kesulitan melaksanakan pola berusahatani sesuai anjuran, mulai dari cara pengolahan tanah, penggunanan benih bersertifikat maupun standarisasi pemupukan ataupun pengendalian hama penyakit. Penyebabnya adalah dikarenakan kekurangan permodalan dan sumber-sumber informasi. Seyogyanya sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam konsep pemberdayaan masyarakat petani (kelompoktani), bahwa upaya pengembangan kelompoktani mandiri harus sejalan dengan upaya peningkatan produksi usahatani baik secara kuantitas maupun kualitas.

Oleh sebab itu materi-materi penguatan manajemen organisasi, kebijakan dan ekonomi harus diberikan secara proporsional dengan materi-materi yang bersifat teknis usahatani. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi antara kemampuan berproduksi petani dengan kemampuan berorgnaisasi dan berbisnis, sehingga petani dan atau kelompoktani, memiliki dasar-dasar yang kuat di dalam manajemen usahatani, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

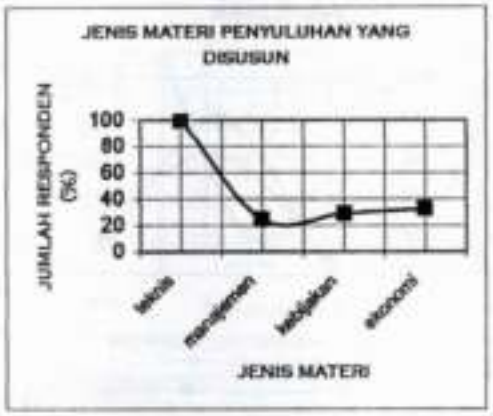

Gambar 4. Jenis Materi Penyuluhan Yang Disusun

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dalam studi ini dititik beratkan kepada pemanfaatan BOP untuk kegiatan kunjungan, bimbingan lapangan maupun demonstrasi percontohan oleh penyuluh pertanian.

Kunjungan dan Bimbingan Lapangan

Kunjungan lapangan kepada petani dan atau kelompoktani dilakukan oleh penyuluh Kabupaten Sukabumi dengan sistem LAKU (Latihan dan Kunjungan), yaitu 4 (empat) hari melakukan kunjungan dan bimbingan di petani dan atau kelompoktani dan 1 (satu) hari melakukan kegiatan latihan serta administrasi pelaporan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Sedangkan yang dimaksud bimbingan dalam kajian ini adalah kegiatan penyuluhan khusus yang diberikan oleh penyuluh kepada petani atau kelompoktani dikarenakan kegiatan tertentu (spesifik), seperti pelaksanaan program/proyek tertentu baik dari pihak pemerintah maupun swasta.

Hasil studi pada Gambar 5, menunjukkan bahwa sebanyak 60,91% dan 78,70% responden melakukan kunjungan maupun bimbingan pada frekuensi sebanyak 3-4 kali dalam seminggu kepada petani dan atau kelompoktani. Hanya 29,09% dan 15,74% responden yang menyatakan bahwa kunjungan dan bimbingan dilakukan lebih dari 4 kali dalam seminggu dikarenakan selain merupakan lokasi proyek percontohan dan tempat berusahatani responden, juga dikarenakan jarak wilayah binaan dengan tempat tinggal yang relatif dekat. Kondisi relatif tingginya persentase frekuensi bimbingan terhadap kunjungan, menunjukkan bahwa memang menurut responden lebih baik melakukan bimbingan kepada petani atau kelompoktani tertentu, karena selain lebih efektif daripada pelaksanaan kunjungan, juga materi bimbingan lebih fokus dan spesifik. Sehingga kemungkinan penerapan dan tingkat keberhasilan dapat lebih terjamin. Hal lain adalah juga dikarenakan tidak jarang bimbingan diikuti dengan bantuan-bantuan berupa sarana produksi, yang harus diawasi pelaksanaannya secara berkala dan berkelanjutan.

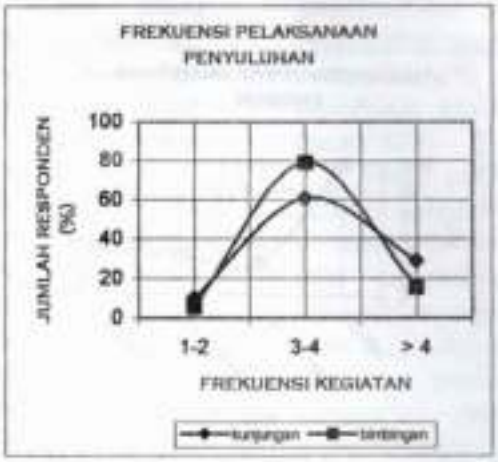

Gambar 5. Frekuensi Pelaksanaan Penyuluhan

Adapun biaya yang dikeluarkan selama kegiatan kunjungan maupun bimbingan, sesuai dengan peruntukkan BOP berdasarkan Undang-un dang Sistem Penyuluhan yaitu digunakan untuk perjalanan tetap dalam rangka kunjungan dan bimbingan. Dimana sebanyak 89,72% dan 76,19% responden menyatakan biaya kunjungan dan bimbingan berasal dari BOP. Dan hanya 10,28% menyatakan biaya kunjungan tidak sepenuhnya dari BOP, mengingat tidak mencukupi. Sedangkan 23,81% responden menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan selama melakukan bimbingan juga diperoleh dari kerjasama dengan pihak pengadaan sarana produksi pertanian.

Jika dilihat dari dasar pelaksanaan kunjungan dan bimbingan, persentase bimbingan atas dasar permintaan petani (36,36%) relatif lebih tinggi daripada persentase kunjungan (22,73%) atas dasar permintaan petani. Sebagaimana terlihat pada gambar 6, bahwa pelaksanaan kunjungan dan bimbingan selain berdasarkan rencana kerja juga dikarenakan permintaan dari petani atau kelompoktani. Berdasarkan konsepsi pembangunan keswadayaan dan kemandirian masyarakat, maka semakin tinggi permintaan petani dan atau kelompoktani terhadap bimbingan, maka ini membuktikan semakin swadaya petani tersebut dan semakin sejahtera kehidupan sosial ekonominya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kebutuhan penyuluhan. Selain itu, hasil studi ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam mendorong penyuluh untuk melakukan kegiatan penyuluhan semakin berkurang yaitu hanya 2,73% dan 4,55% responden menyatakan bahwa kunjungan dan bimbingan yang dilakukan atas perintah dari dinas. Dan itupun hanya difokuskan dalam rangka supervisi maupun evaluasi program dinas.

Gambar 6. Dasar Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan Petak Percontohan (Demonstrasi Percontohan)

Guna keberhasilan dari suatu pelaksanaan program dalam rangka peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan petani serta peningkatan kualitas produksi hasil-hasil pertanian, tidak hanya didukung oleh sumberdaya alam yang subur, banyaknya frekuensi kunjungan maupun bimbingan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh petak-petak percontohan komoditas yang berkesinambungan.

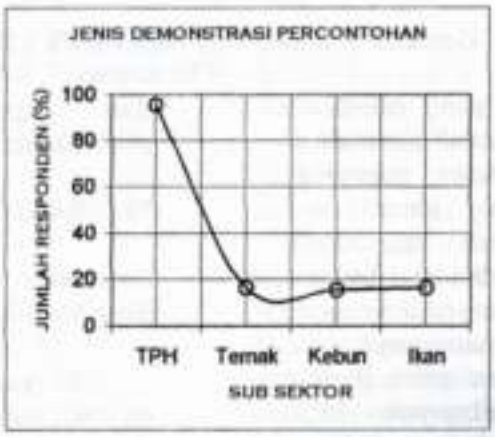

Gambar 7. Jenis Demonstrasi Percontohan

Hasil studi menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan demonstrasi percontohan, sebanyak 59,05% responden turut berpartisipasi dalam pembuatan percontohan dengan frekuensi 3-4 kali dalam setahun, dan sebanyak 33,33% responden berpatisipasi lebih dari 4 kali percontohan dalam setahun. Tingginya partisipasi responden dalam pembuatan percontohan, salah satunya dikarenakan mendapatkan dukungan pembiayaan, bahan-bahan, peralatan dari perusahaan sarana produksi pertanian. Partisipasi responden dalam pembuatan percontohan usahatani utamanya sebanyak 95,45% responden menyatakan turut berpatisipasi dalam pembuatan petak percontohan untuk sub sektor tanaman pangan (padi, palawija) dan hortikultura khususnya sayur-sayuran, 16,36% subsektor peternakan, 15,45% perkebunan dan16,36% perikanan. Dan tingginya partisipasi penyuluh dalam pembuatan percontohan sub sektor tanaman pangan dikarenakan 89,70% penyuluh berlatar belakang pendidikan tanaman pangan, dan juga disebabkan banyaknya program-program nasional dan

percontohan berasal dari dinas tanaman pangan. Seperti seperti halnya program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Hasil pertanyaan mendalam diketahui bahwa tingginya tingkat partisipasi peyuluh dalam pembuatan petak percontohan tanaman pangan dikarenakan selain memerlukan waktu yang relatif cepat (rata-rata empat bulan produksi) dengan luasan yang relatif sempit (1000 meter) dan juga dengan biaya yang relatif murah (Rp. 300.000,- - Rp. 500.000,-). Sehingga apabila terjadi kegagalanpun relatif ringan dan bisa ditanggulangi sendiri oleh penyuluh.

Jika dilihat dari sumber pembiayaan untuk membuat sebuah petak percontohan (demplot), maka sebanyak 47,27% responden menyatakan biaya diperoleh dari pribadi, 46,36% responden menyatakan biaya demplot bersumber dari dinas, dan 55,45% bersumber dari petani atau kelompoktani serta 20% merupakan *sharing* dengan fihak perusahaan pengadaan saprodi (formulator).

Gambar 8. Biaya Rata-Rata Untuk 1 Buah Demplot

Besarnya biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk pembuatan 1 (satu) buah percontohan, sebanyak 47,66% responden menyatakan bahwa biaya rata-rata yang umum dikeluarkan berkisar antara Rp. 300.000,- s.d Rp. 500.000,-, yang terdiri dari beberapa petak atau lebih dari satu jenis komoditas yang diujicobakan. Dan umumnya adalah komoditas tanaman pangan yaitu padi dan palawija. Sedangkan sebanyak 28,97% menyatakan hanya membuat demplot dengan biaya kurang dari Rp. 300.000,- dikarenakan hanya diperuntukkan untuk satu petak ataupun 1 jenis komoditas percontohan dengan ukuran relatif kecil. Tingginya persentase responden dalam melakukan pengkajian dalam bentuk demplot yaitu 47,66% dengan nilai biaya rata-rata 300-500 ribu rupiah, sebagian besar dilakukan untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura seperti padi, jagung, palawija dan sayur-sayuran. Sedangkan untuk demplot dengan ukuran biaya rata-rata 500 ribu-1 juta rupiah ataupun lebih dari 1 juta, umumnya dilakukan responden dengan dukungan pembiayaan dari perusahaan jasa saprodi dan diperuntukkan bagi komoditas peternakan, perkebunan dan perikanan.

PEMBAHASAN

Pemanfaatan BOP Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Penyuluhan Pertanian

Banyaknya aktivitas yang tercantum di dalam programa penyuluhan yang disusun dengan melibatkan perwakilan-perwakilan petani dan pengusaha di bidang pertanian di wilayah, serta didukung peran aktif penyuluh pertanian dalam penyusunan maupun sebagai sumber biaya pribadi, perlu diketahui pelaksanaannya dilapangan.

Hasil studi menunjukkan bahwa, 78,22% responden menyatakan hanya sebagian kegiatan yang tercantum di dalam programa dapat dilaksanakan dan 21,78% responden menyatakan seluruh kegiatan dalam programa dapat dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pertemuan (67,27%), kunjungan (72,73%) dan demonstrasi percontohan serta pelatihan dalam bentuk sekolah lapangan (26,36%).

Rendahnya realisasi pelaksanaan kegiatan programa tersebut tentunya tidak terlepas dari RKPP yang tersusun dan keakuratan ataupun kesesuaian dari materi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner, hanya 29,52% responden yang mampu melaksanakan RKPP secara utuh (100%), dan 70,48% menyatakan hanya sebagian kegiatan dalam RKPP yang dapat dilaksanakan.

Alasan utama sebagian besar tidak dapat direalisasikan sebagaimana terlihat pada gambar 9, adalah 45,45% responden menyatakan karena kurangnya dukungan berupa sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini Dinas/KPPP, terutama untuk ketersediaan (bahan) materi dan media alat bantu penyuluhan sebagai bahan informasi penyuluhan, fasilitas kerja seperti komputer, LCD, atk, serta minimnya biaya operasional yang diberikan.

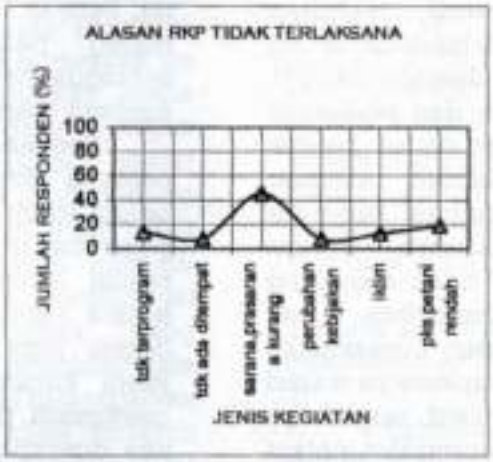

Gambar 9. Alasan RKPP Tidak Terlaksana

Selanjutnya dikatakan bahwa 13,64% responden menyatakan memang kegiatan tersebut tidak terprogram baik di dalam programa maupun RKPP, dikarenakan kebijakan disampaikan setelah programa dan RKPP tersusun dan berjalan. Selain karena faktor iklim (cuaca) yang tidak mendukung (12,73%), dan adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat (8,18%), alasan tidak terlaksananya RKPP juga disebabkan oleh pengetahuan dan keterampilan petani yang relatif rendah (19,09%).

Rendahnya dukungan sarana, prasarana penyuluhan serta kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan baik pusat maupun daerah di era otonomi ini, menyebabkan penyuluhan berjalan lambat, dan akan sulit mencapai keberhasilan walaupun itu merupakan program/kebijakan pemerintah. Sebagaimana diungkapkan oleh Sikhondze(1999), bahwa orientasi penyuluhan sebagai pemberdayaan masyarakat harus dapat membantu petani-nelayan agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi yang ada, yang ditetapkan secara partisipatoris dengan metode berorientasi kebutuhan sasaran dan bersifat praktis baik dalam layanan untuk individu maupun kelompok.

Oleh sebab itu sangatlah penting penyusunan rencana kerja itu juga melibatkan perwakilan kelompoktani dan pengusaha di bidang pertanian secara partisipatif, seperti halnya dalam penyusunan programa. Hal ini agar RKPP yang disusun juga benar-benar merupakan pencerminan kebutuhan petani dan atau kelompoktani, masyarakat setempat, sehingga pada akhirnya juga akan mendapatkan dukungan optimal secara swadaya baik oleh masyarakat petani maupun oleh pengusaha pertanian.

Ditinjau dari aspek keberadaaan materi penyuluhan, berdasarkan jawaban dari responden menunjukkan bahwa sebanyak 46,36% responden menyatakan bahwa seluruh materi yang disampaikan relatif dapat diterapkan oleh petani dan atau kelompoktani dan sebanyak 53,64% responden menyatakan relatif hanya sebagian dari materi yang disampaikan pada akhirnya dapat diterapkan oleh petani dan atau kelompoktani dilahan usahataninya. Alasan hanya sebagian materi penyuluhan yang dapat dilaksanakan dikarenakan 14,55% responden menyatakan materi yang disampaikan tidak responsif terhadap perubahan teknologi, 20,91% tidak didukung oleh program pemerintah daerah, 24,55% tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di dinas baik dalam bentuk ketersediaan saprodi, alsintan maupun petugas khusus yang menangani program tersebut dan tidak adanya (biaya operasional), serta 23,64% tidak didukung dengan petak-petak percontohan. Dan selanjutnya 12,73% responden menyatakan bahwa penyebab tidak diterapkannya materi penyuluhan dikarenakan relatif rendahnya pengetahuan sikap dan keterampilan petani dalam memahami materi yang disampaikan, berkaitan dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah.

Hasil pertanyaan mendalam kepada penyuluh pertanian, atas relatif rendahnya penerapan materi yang disampaikan dan adanya ketidaksesuaian materi dengan kebutuhan maupun kemampuan petani dan atau kelampoktani, disebabkan karena materi penyuluhan yang disampaikan tersebut memang sudah tersedia (lama) dan hanya di reproduksi menjadi bahan materi penyuluhan yang dikemas dalam bentuk yang lebih baru atau modern, tetapi secara substansial tidak terjadi penyesuaian-penyesuaian dari segi isi pokok bahasan terhadap kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat.

Selanjutnya juga dikatakan bahwa dari 79,82% responden yang mendapatkan informasi pertanian dalam bentuk materi penyuluhan, sebanyak 63,64% menyatakan materi yang diperoleh bersumber dari dinas, 28,18% dari BPTP dan 39,09% hasil pembelian di toko buku. Adapun jenis materi yang diperoleh dari dinas 94,55% menyatakan memperoleh materi penyuluhan yang bersifat teknis budidaya/produksi, mulai dari pembibitan sampai dengan produksi dari satu komoditas tertentu. Tingginya aktivitas penyuluh dalam penyampaian materi dan pemecahan masalah selama kunjungan maupun bimbingan, menunjukkan bahwa materi sebagai bahan informasi penyuluhan memegang peranan penting dalam perubahan usahatani petani. Kualitas informasi sebagai materi, adalah kehandalan dari jenis informasi. Kehandalan ini menyangkut sumber informasi darimana informasi itu didapatkan dan apakah informasi itu telah teruji secara baik. Selama ini, banyak informasi yang dikemas sebagai materi penyuluhan kurang berkualitas sehingga ketika informasi itu dilaksanakan hasilnya mengecewakan.

Penyebab ketidakhandalan informasi *pertama* disebabkan karena informasi itu belum teruji dengan baik, bibit, harga, dan pasar disuatu daerah misalnya, bisa saja baik sesuai dengan daya dukung daerahnya: secara teknis, sosiologis, dan ekonomis, - begitu juga dengan informasi permintaan suatu komoditi dari luar yang seringkali mengecoh petani, tetapi belum tentu baik jika diterapkan di daerah lain karena daya dukung daerahnya tidak sesuai. *kedua*, masih jarangnya komunikasi antara penyuluh dan petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian dengan lembaga-lembaga penelitian dan lembaga-lembaga pendidikan dimana inovasi-inovasi baru dihasilkan baik dari segi bibit unggul baru, teknis budidaya, harga, analisa ekonomi, dan peluang pasar. Sehingga penyuluh dan petani kurang mendapatkan informasi baru mengenai inovasi, akibat selanjutnya kepada petani khususnya kehilangan kesempatan dalam mengelola usahataninya ke arah yang lebih baik.

Kandungan informasi, sangat penting dalam menggugah petani dalam meningkatkan pengelolaan usahataninya. Selama ini, kandungan informasi yang didapat relatih rendah, karena pada umumnya hanya berkisar pada tanaman pangan dan sayuran, dimana petani sudah sejak lama mengusahakannya. Ini sangat berpengaruh kepada sikap dan perilaku petani ketika mendapat informasi itu. Semakin tinggi kandungan informasi suatu inovasi maka akan semakin tinggi minat untuk melaksanakan inovasi itu, dan semakin

rendah kandungan informasi suatu inovasi maka semakin rendah minat untuk mengadopsi. Tinggi rendahnya kandungan informasi ini sangat mempengaruhi proses adopsi-inovasi.

Oleh sebab itu menurut **Raymond Mc Leod, Jr (1995)**, ada tahapan dalam penghimpunan informasi agar informasi yang diberikan benar akurat dan dibutuhkan oleh petani. *Pertama* adalah menghimpun berbagai data mentah yang diperlukan dalam pembangunan pertanian mulai dari analisa daya dukung daerah (kesuburan tanah, klimatologi, tata guna lahan, komposisi penduduk, dan peruntukan lahan), informasi pasar, informasi sarana produksi baru. *Kedua*, memilah-milah data mentah itu dan merumuskan dan menentukan mana yang dapat dikembangkan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan tingkat permintaan dan daya dukung daerah. Dan *ketiga* barulah data yang telah dirumuskan itu kemudian diolah menjadi informasi yang siap untuk dikomunikasikan kepada petani sebagai pihak yang membutuhkan. Akan tetapi, sebelum data yang telah menjadi informasi itu disampaikan kepada petani, maka perlu diuji terlebih dahulu kualitasnya. Pengujian dalam hal ini dilakukan oleh lembaga penelitian dan pendidikan (Perguruan Tinggi). Kalau memang sudah benar-benar akurat maka informasi itu siap untuk dikomunikasikan kepada petani melalui berbagai program penyuluhan langsung maupun tak langsung, dan dalam pelaksanaannya harus terus menerus dipantau. Namun demikian, jika ada informasi baru yang ternyata lebih menguntungkan, maka dengan segera pemerintah, lembaga penelitian dan pendidikan, melalui petugas penyuluhan memberitahukannya kepada petani agar mengganti informasi itu dengan yang baru. Dengan kata lain informasi lama itu harus dibuang.

Harus diingat, petani kecil dan buruh tani yang menempati strata terbesar dari seluruh lapisan petani, masih belum terangkat tingkat kesejahteraannya. Karena itu, segala upaya dalam program pembangunan pertanian yang tertuang dalam programa penyuluhan pertanian harus lebih memberi perhatian dan peluang bagi upaya-upaya untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Upaya ke arah itu dapat dilakukan penyuluh pertanian dengan memulai kegiatan persiapan penyuluhan dari pengamatan terhadap aspek identifikasi terhadap bidang-bidang usaha dipedesaan, tidak saja pada tingkat primer, juga sekunder dan tersier, tetapi juga aspek identifikasi terhadap petani. Dengan diperolehnya klasifikasi petani, maka dapat dilakukan pengarahan-pengarahan kegiatan usaha yang sesuai dengan potensinya masing-masing, terutama sekali kepada petani progresif (petani menengah dan kaya). Dan selanjutnya mengidentifikasi sumber-sumber dari faktor produksi dimana ada modal, keakhlian, lahan, fasilitas, teknologi, ataupun akses terhadap sumber-sumber inovasi dan kelembagaan, kemudian secara keseluruhan diintegrasikan kepada sistem manajemen pembangunan pertanian yang terangkum secara keseluruhan di dalam programa penyuluhan pertanian dan rfencana kerja penyuluh pertanian.

Pemanfaatan BOP Berdasarkan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan kunjungan dan bimbingan penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terprogram, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan petani dalam berusahatani (produksi). Tetapi aktivitas penyuluh pertanian selama berada dilokasi petani dan atau kelompoktani pada saat kunjungan dan bimbingan merupakan indikator penting pencapaian keberhasilan usahatani secara kualitas (produktivitas).

Hasil studi menunjukkan bahwa aktivitas responden selama kunjungan dan bimbingan di petani dan atau kelompoktani relatif tinggi adalah melakukan penyampaian materi dan pemecahan masalah. Sedangkan aktivitas terendah adalah melakukan identifikasi maupun demonstrasi percontohan ataupun latihan dalam bentuk sekolah lapangan. Perbedaan mencolok kegiatan selama bimbingan adalah dilakukannya penyusunan rencana-rencana baru (23,64%). Ini membuktikan bahwa memang bimbingan lebih difokuskan kepada program-program yang bersifat khusus baik dari pemerintah maupun dari petani itu sendiri.

Secara teori, tingginya aktivitas kunjungan dan bimbingan penyuluhan pada kegiatan penyampaian materi dan

pemecahan masalah sebagaimana terlihat pada gambar 10, maka seharusnya akan berbanding lurus terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani. Tetapi pada kenyataannya produktivitas hasil pertanian di Kabupaten tersebut relatif masih rendah dengan pendapatan perkapita Rp. 3455,657,-KK/tahun dan 35,82% berada di bawah garis kemiskinan.

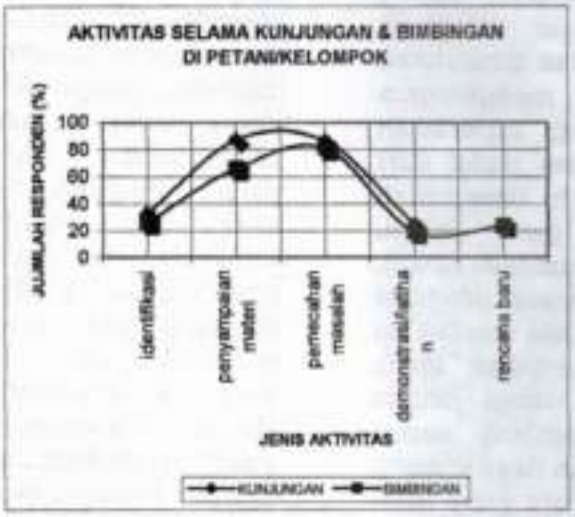

Gambar 10. Aktivitas Selama Kunjungan Di Petani/ Kelompok

Hasil pertanyaan mendalam baik kepada penyuluh sebagai responden maupun kepada petani selaku pelaku utama, diketahui bahwa penyampaian materi dan pemecahan masalah yang dilakukan penyuluh pada saat kunjungan dan bimbingan, tidak tepat waktu dan kondisi serta tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Ini menunjukkan bahwa programa dan rencana kerja penyuluh yang tersusun tidak mencerminkan program atau kegiatan usahatani petani dan kelompoktani.

Menilik dari prosedur penyusunan programa dan RKPP, yang disusun dari hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, maka sudah barang tentu materi yang disampaikan dan pemecahan masalahnya tidak akan akurat. Hal ini dikarenakan Programa dan RKPP yang disusun tersebut 75% merupakan pencerminan kebutuhan tahun sebelumnya, yang diperoleh dari hasil analisa evaluasi dan pelaporan. Jika demikian, maka sudah selayaknya aktivitas pelaksanaan penyuluhan dalam bentuk kunjungan di lapangan persentasenya lebih ditingkatkan kepada identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta praktek/demonstrasi lapangan (pembuatan petak-petak percontohan) atau dalam bentuk sekolah lapangan. Bukan kepada penyampaian materi dan pemecahan masalah. Ini mengingat materi dan pemecehan masalah yang disampaikan adalah berdasarkan situasi dan kondisi tahun sebelumnya.

Selanjutnya peranan penyuluh selama berada di petani dan kelompoktani lebih ditekankan sebagai fasilitator, yang bertugas memfasilitasi terjadinya *urun rembug* petani dan atau kelompoktani di dalam pembahasan usahatani, bukan sebagai pemecah masalah. Dengan demikian akan diperoleh hasil yang maksimal di dalam pelaksanaan kunjungan maupun bimbingan.

Dinamisnya sistem komunikasi dan informasi yang dilakukan penyuluh melalui metode kunjungan dan bimbingan akan menghasilkan keragaman permintaan komoditas usahatani, dan ini akan membuka jalan tergalinya berbagai potensi daerah, karena tidak semua komoditi bisa diterapkan hanya di satu daerah. Karena itu, keunggulan-keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif suatu daerah dapat dimanfaatkan, akibat selanjutnya akan terjadi pengembangan lokalita. Upaya percepatan ini dapat dilakukan melalui petak-petak percontohan yang intensif dan berkesinambungan dengan berbagai pendekatan baik komoditas, varietas maupun paket teknologi.

Jika diukur berdasarkan tingginya jumlah responden yang melakukan

percontohan tanaman pangan (95,46%), dengan jenis demplot yang dilakukan sebanyak 82,73% bersifat teknis budidaya, 31,82% HPT, 70% produksi, dan 10% percontohan pembiakan, ini menunjukkan dominasi subsektor tanaman pangan dan hortikultura.

Alasan percontohan lebih banyak kepada teknis budidaya dan produksi pada sub sektor TPH dikarenakan selain 90% latar belakang pendidikan penyuluh pertanian di wilayah tersebut adalah tanaman pangan, juga banyaknya pelatihan TPH yang diikuti. Selanjutnya dijelaskan bahwa percontohan teknis budidaya dan produksi TPH mempunyai jangka waktu yang relatif singkat dengan biaya relatif murah dan tanpa memerlukan peralatan yang khusus dengan resiko kegagalan relatif rendah. Sedangkan untuk komoditas dari subsektor lain, selain memang jarang terdapat program percontohan dari pemerintah (dinas yang bersangkutan) juga dikarenakan penyuluh kesulitan dalam memperoleh bahan informasinya, sehingga tidak menguasai teknologinya.

Kondisi ini mengakibatkan inovasi teknologi yang diharapkan muncul baik dilakukan oleh penyuluh maupun petani melalui percontohan-percontohan, menjadi sangat langka dan bahkan relatif hanya berupa penerapan.

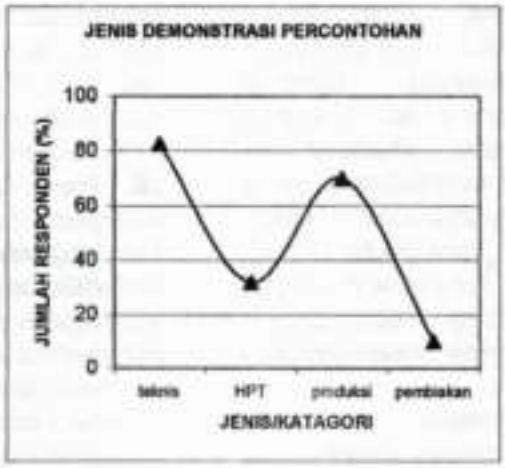

Gambar 13. Jenis Demonstrasi Percontohan

Keterbatasan kemampuan penyuluh maupun petani dalam menghasilkan inovasi (teknologi baru) melalui demonstrasi percontohan selain disebabkan hanya berkutat pada penerapan teknologi di sub sektor TPH, juga adalah disebabkan karena pengkajian (demplot) yang selam ini dilakukan tidak terarah, kurangnya suatu pendekatan yang analitis dan rancangan ujicoba yang lemah. Berdasarkan hal di atas **Connell (1990)** menyimpulkan bahwa hasil pengembangan teknologi oleh penyuluh dan petani tidak terarah dan tidak menentu. Ujicoba menjadi terbatas karena kurangnya informasi tentang pilihan-pilihan potensial dalam mencari teknologi yang lebih baik, kurangnya pemahaman ilmiah tentang proses-proses yang berperan berlangsung di dalam uji coba, terlalu banyak variabel dalam uji coba mereka yang mengakibatkan interpretasi hasilnya sangat sukar, dan tidak memadainya metode pengukuran untuk mencapai kesimpulan yang logis tentang apa yang ingin mereka teliti atau uji serta tidak bisa saling memanfaatkan gagasan, penemuan, dan interpretasi hasil uji coba sesama penyuluh maupun petani.

Padahal jika dilihat berdasarkan informasi yang sangat dibutuhkan petani maka sejumlah 85,45% menginginkan petak percontohan yang dibuat oleh penyuluh itu selain bersifat teknologi-teknologi terapan, juga harus tepat guna dan ekonomis, dan 44,55% responden mengatakan bahwa petani sangat mengharapkan petak percontohan agribisnis.

Berdasarkan pandangan teori modernisasi, yaitu teori struktural dan fungsional, menegaskan bahwa "pendidikan" memegang peranan penting dalam perkembangan sosial ekonomi masyarakat melalui penemuan sistem nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku yang diperlukan oleh dunia kerja. Tokoh ternama, **Emile Durkheim**, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fakta sosial yang berada pada luar individu, diri individu, dan lingkungan masyarakat (moral dan solidaritas masyarakat) yang saling mempengaruhi di dalam sistem sosial.

Pendidikan sebagai sarana transformasi budaya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sangat relevan dengan aspek *"survival"*, kemerdekaan, humanisasi, pemberdayaan, dan rasionalisasi. Tujuan akhir dari proses transformasi ini ialah terciptanya produktivitas, etos kerja, kemandirian, dan jati diri manusia yang unggul untuk memenuhi tuntutan pembangunan. Oleh sebab itu **Coombs** (1974) memandang perlu diadakannya program "pembangunan pendidikan" yang berorientasi kepada masyarakat miskin melalui pendidikan, baik pendidikan formal, informal, dan non-formal terutama kalangan petani, nelayan, pedagang kecil, buruh pabrik, dan pengrajin guna meningkatkan produktivitas mereka.

Untuk mempercepat proses perkembangan sosial ekonomi masyarakat pertanian, menurut **Salmon Padmanagera (1995)**, prinsip pendidikan kepada petani hendaknya juga dapat diberlakukan kepada penyuluh pertanian yaitu; *pertama* prinsip pertanian harus dipandang sebagai suatu sistem kompleks yang hidup, tempat manusia berinteraksi dengan tanah, air, tanaman dan organisme hidup lainnya, dalam mengoptimalkan sumberdaya yang ada. *Kedua* prinsip pendidikan pertanian membantu penyuluh belajar mengorganisasi diri mereka sendiri dan masyarakat di sekitarnya, dan *ketiga* prinsip pendidikan pertanian sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia. Bukan pembawa paket teknologi untuk diterapkan secara seragam oleh petani, tetapi membantu para petani menguasai konsep berfikir yang baru dan menerapkan cara-cara baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Proses ini jika diterapkan kepada penyuluh pertanian akan memampukan mereka dalam menghadapi masalah-masalah baru dan berani melakukan percobaan untuk mencari jawaban atas permasalahan agronomik yang ditemui di lapangan/di lahannya.

Pendekatan ini tidak hanya membantu penyuluh menjadi lebih terampil, tetapi juga memperkokoh hubungan antara peneliti pertanian, petani (kelompoktani) dan penyuluh pertanian itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi Pelaksanaan Penyuluhan Pasca Pemberian BOP yang dilihat dari 3 (tiga) aspek utama dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan penyuluhan pertanian pasca pemberian BOP, secara kuantitas cenderung meningkat, ditunjukkan dari relatif tingginya persentase pemanfaatan BOP untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaan
2. Pemanfaatan BOP terhadap pelaksanaan penyuluhan berdasarkan pelaksanaan kegiatan persiapan penyuluhan sebelum dan sesudah diberikannya BOP, relatif meningkat secara signifikan, khususnya terhadap penyusunan programa dan rencana kerja penyuluh pertanian, tetapi dari sisi kualitas pelaksanaan cenderung menurun, ditunjukkan dari penerapan kegiatan persiapan yang relatif rendah meliputi; penerapan programa, RKPP dan materi penyuluhan.
3. Pemanfaatan BOP berdasarkan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang diukur dari frekuensi kunjungan dan bimbingan, secara relatif meningkat dengan frekuensi 3-4 kali seminggu, juga ditunjukkan dari tingginya aktivitas penyuluh dalam pemecahan masalah dan penyampaian materi selama kunjungan dan bimbingan di petani/kelompoktani.
4. Tingginya aktivitas penyuluhan dalam bentuk penyampaian materi dan pemecahan masalah, tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usahatani petani secara kuantitas maupun kualitas.
5. Pemanfaatan BOP terhadap kegiatan pelaksanaan penyuluhan yang diukur dari frekuensi pembuatan petak

percontohan secara relatif meningkat dengan frekuensi 3-4 kali dalam setahun.

Saran

Penyusunan programa penyuluhan hendaknya disusun bersamaan waktunya dengan penyusunan program pembangunan pertanian subsektor wilayah masing-masing. Hal ini untuk menghindari ketidaksikronan pada saat pelaksanaan programa di lapangan yang tidak sejalan dengan program pertanian di setiap wilayah. Selanjutnya pelibatan setiap unsur pelaku utama (petani, kelompoktani, Gapoktan) dan pelaku usaha di bidang pertanian (pengadaan jasa saprodi, jasa alsintan, jasa permodalan/perkreditan), di setiap tingkatan wilayah pemerintahan dalam rangka penyusunan programa mutlak diperlukan, guna menciptakan rasa tanggungjawab dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan maupun pembiayaan pembangunan pertanian seutuhnya.

Penyusunan RKPP yang selama ini disusun secara mandiri oleh setiap penyuluh pertanian, ke depan hendaknya disusun secara bersama-sama dengan melibatkan petani/kelompoktani perwakilan pengusaha di bidang pertanian di wilayah binaanya masing-masing, sehingga baik materi, metoda dan media yang disusun benar mewakili kebutuhan masyarakat pertanian wilayah binaannya masing-masing, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan betul-betul dapat diterapkan.

Rencana kerja yang disusun selanyaknya berdasarkan skala prioritas dan tidak hanya prioritas kepada komoditas tertentu tetapi juga kepada prioritas wilayah pembangunan meliputi katagori kelompok sasaran dan output yang diharapkan. Oleh sebab itu didalam rencana kerja harus mengklasifikasikan output berdasarkan tingkat pendapatan ataupun skala usaha, tingkat pendidikan, ataupun tingkat kerjasama yang terjalin, sehingga melalui klasifikasi tersebut dapat dipetakan kelompok sasaran berdasarkan kelompok pembelajaran, kelompok penerapan, dan kelompok pengembangan.

Informasi yang disampaikan harus menyebar keseluruh segmen organisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan memberikan umpan balik kepada pemberi informasi. Informasi tidak selalu menggunakan bahasa-bahasa yang formal, tetapi juga dapat dengan kalimat percakapan yang bersifat mengajak bukan perintah.

Perubahan mendasar yang dilakukan dalam pelaksanaan penyuluhan harus dimulai dari perencanaan sebuah kegiatan. Perencanaan itu harus memperhatikan dua aspek yang berbeda yaitu aspek yang berhubungan dengan subsatansial (materi/kontent) dan aspek yang berhubungan dengan penciptaan kondisi (konteks).

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2001. *Penyuluhan Pertanian* , Yayasan Sinar Tani. Jakarta.

Anonim, 2006. *Keragaan Penyuluh Pertanian Kabupaten Sukabumi.* Laporan Tahunan KPPP.

Coombs H. Philip and Ahmed, Manzoor, 1974. *Attacking Rural Poverty: How Non Formal Education Can Help, IBRD.* John Hopkins University Press, Baltimore.

Departemen Pertanian. 2004. *Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan dalam Era Otonomi Daerah.* Badan Pengembangan SDM Pertanian. Jakarta.

Departemen Pertanian. 2005. *Pedoman Penyelenggaraan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian,* Badan Pengembangan SDM Pertanian. Jakarta.

Departemen Pertanian. 2006. *Undang-Undang Nomor 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian.* Badan Pengembangan SDM Pertanian. Jakarta.

David Osborne and Ted Gaebler, 1993. *Reinventing Government,* A Plume Book, New York,

Kasali, R. 2006. *Change: Manajemen Perubahan dan Manajemen Harapan.* Gramedia Jakarta.

Rogers, Everett M, *Diffusions of Innovations*, Third Edition, The Free Press, Colier Macmillan Publishers, London.

Sikhonze, Wilson B. 1999. *The Role of Extension in Farmer Education and infromation Dissemination in Swaziland. Journal: Edult Education and Development No. 53/1999 Institute for Intenational Cooperation of The German*. Adult Education Association, Bon. 112/DVV

Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB Press. Bogor.

Soedijanto, 2003. *Penyuluhan sebagai Pilar Akselerasi Pembangunan Pertanian di Indonesia pada Masa Datang*. Badan Pengembangan SDM dan Penyuluhan Pertanian.

Salmon Padmanagara, 1996. *PHT oleh Petani*, Paper untuk seminar Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Bogor,

Van den Ban, A.W dan H.S. Hawkins, 1999. Penyuluhan Pertanian. Terjemahan A.D. Herdiastuti. Kanisius. Yogyakarta